



| KORAN          | HAL |
|----------------|-----|
| Haluan         |     |
| Padang Ekspres | 2   |
| Singgalang     |     |
| Pos Metro      |     |

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

## Menkeu Evaluasi Dana Transfer ke Pemda

### Mendikbud Laporkan Anomali Dana Pendidikan

Jakarta, Padek—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy membantah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyentil dirinya. Soal anggaran jumbo, namun belum mampu meningkatkan kualitas sumber daya alam. Justru, dia menyampaikan adanya anomali anggaran fungsi pendidikan.

Setiap tahun, dana alokasi umum (DAU) pendidikan selalu naik. Dalam 10 tahun terakhir, dana tersebut meningkat 221 persen. Dari 2009 sebesar Rp 153 triliun menjadi Rp 429,5 triliun pada 2019. Dana sebanyak itu digunakan untuk gaji dan tunjangan guru ASN (aparatur sipil negara).

Padahal, lanjut Muhadjir, lebih dari 40 ribu guru pensiun setiap tahun. Sementara itu, tidak ada pengangkatan guru ASN baru dalam dua tahun terakhir. Di sisi lain, ketika Kementerian Penerimaan dan Pengeluaran Negara

dan Reformasi Birokrasi (Kemendikbud-RB) menyetujui jumlah pengangkatan 155 ribu guru ASN, mayoritas pemerintah daerah (pemda) enggan mengambil kuota tersebut.

Alasannya, tidak ada anggaran. Akibatnya, banyak sekolah-sekolah merekrut guru honorer sebagai pengganti para guru yang pensiun. Gajinya diambil dari dana BOS (bantuan operasional sekolah). "Sehingga tujuan BOS yang seharusnya biaya operasional sekolah tidak optimal," keluh Muhadjir kepada Jawa Pos kemarin.

Masalah itu pula yang membuat Muhadjir meminta para guru yang sudah purna tugas untuk tetap memberikan pengabdian mereka. Sampai ada guru PNS pengantinya. Selama pengabdian tersebut status guru itu tetap pensiunan. Gajinya diambil dari dana BOS.

"Itu yang saya sebut anomali anggaran fungsi pendidikan yang ditransfer ke daerah. Penjelasan itu saya sampaikan ke Bu Menkeu saat rapat di Kemenkeu, Kamis lalu (1/8)," terang menteri 63 tahun itu.

Apakah ada dugaan potensi penyelewengan anggaran pendidikan di daerah? Muhadjir enggan berspek-

ulasi. Hanya, di setiap laporan anggaran, pemda menyebut 'diperkirakan untuk pendidikan'. Kemendikbud bersama Kemenkeu sedang membahas dan mengevaluasi masalah tersebut. Keduanya sudah dua kali bertemu pada 26 dan 31 Juli di kantor Kemendikbud.

Hingga, saat ini saya masih menunggu penjelasan dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, mengapa daerah tidak mau mengambil jatah guru seleksi ASN (CPNS dan PPPK, Red)," kata mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan, masalah itu yang membuat kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan tidak meningkat. Padahal, DAU fungsi pendidikan selalu bertambah setiap tahun. Penggunaan dana pendidikan tersebar ke gaji dan tunjangan guru, sertifikasi, hingga operasional sekolah yang diberikan kepada pemda.

"Ini bukan hanya soal jumlah uang. Tapi bagaimana menggunakan uang tersebut dan kebijakan yang mendasarinya. Sehingga memberikan hasil yang efektif," papar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. (han/jpg)